

**EVALUASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DAERAH KUMUH (RSDK) DALAM KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KELURAHAN WONOREJO KECAMATAN TEGALSARI KOTA SURABAYA**

**Alfiorina Heru Eriza**

S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA (alfio.rina2@gmail.com)

Indah Prabawati, S.Sos., M.Si.

**Abstrak**

Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) dalam kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni ini merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintahan Provinsi Surabaya kepada masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan / atau keluarga miskin utamanya dikawasan permukiman kumuh.

Penelitian evaluasi program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dalam kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni ini dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan program tersebut, dengan menggunakan indikator dan tolak ukur berdasarkan kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Adanya evaluasi program RSDK dalam kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni ini dapat memberikan informasi/ rekomendasi tentang perkembangan program.

Hasil dari evaluasi ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program yang sudah cukup sesuai dengan kriteria pelaksanaan program. Tujuan dan sasaran target program tepat sasaran karena syarat target sasaran yang disebutkan di Perwali adalah masyarakat miskin yang mempunyai rumah tidak layak huni. Efisiensi pelaksanaan program, belum sepenuhnya efisien karena masih ada kekurangan terjadi dalam jumlah pekerja perbaikan rumah yang kurang. Serta dana yang diberikan oleh warga kurang mencukupi untuk perbaikan keseluruhan bangunan rumah warga. Seharusnya adanya penambahan pekerja untuk memperbaiki rumah warga. Kecukupan pelaksanaan program yang dinilai dari keberhasilan aspek fisik meningkat tinggi. Perataan dilihat dari sosialisasi dan pemerataan dana bantuan sudah dilakukan secara adil. Tingkat responsivitas masyarakat program perbaikan rumah tidak layak huni cukup tinggi karena dari awal pelaksanaan program sampai selesainya program peran masyarakat sangat berpengaruh. Ketepatan pelaksanaan program ini juga sesuai dengan yang diinginkan. Pemahaman masyarakat tentang program perbaikan rumah ini cukup baik.

**Kata Kunci:** Evaluasi Program, perbaikan rumah tidak layak huni

**UNESA**  
Universitas Negeri Surabaya

# EVALUATION OF THE SOCIAL REHABILITATION PROGRAM (RSDK) SLUM IN HOME IMPROVEMENT ACTIVITIES UNINHABITABLE

Alfiorina Heru Eriza

S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA (alfio.rina2@gmail.com)

Indah Prabawati,S.Sos.,M.Si.

## Abstract

Social Rehabilitation Programme the slums (RSDK) in home improvement activities not livable was the assistance provided by the Government of the province of Surabaya to the poor who occupies the House is not livable for the purpose of improving the quality of life of community socioeconomic and/or poor families mainly come within the slums. Program execution RSDK home improvement is not livable arranged in Surabaya Mayor Rules Number 33 in 2011 about the guidelines of the implementation of the Social Rehabilitation Programme the slums of the city of Surabaya, ranging from institutional preparation, the criteria and conditions of the program beneficiaries, until the implementation of the activities of home improvement is not livable.

Evaluation of the Social Rehabilitation Programme the slums of nature home improvement activities not livable to see to what extent the success of the program, by using indicators and benchmark based on the criteria of effectiveness, efficiency, sufficiency, alignment, responsiveness, and precision. So, with the evaluation of program activities in the RSDK home improvement is not habitable it could provide information/recommendations on the development of the program.

The results of this evaluation showed that in general the implementation of programs that are already fairly in accordance with the criteria of the implementation of the program. Goals and objectives the program's target is right on target because the target objectives, the terms mentioned on Perwali are poor people who have home is not livable. The efficiency of the implementation of the program, not yet fully efficient because there is still a shortage occurred in the number of workers who lack home improvements. Adequacy of program execution that is judged from the physical aspect of the success of the s improved height. Alignment of sosialisation and equitable relief fund have been carried out in a fair manner. The level of responsiveness of community programs home improvement is not habitable is quite high because from the start of program execution until completion of the programme the role of the community is very influential. The precision of the implementation of this programme also complies with the desired. Understanding of the people about home improvement program is good.

**Keywords:** program evaluations, home improvement uninhabitable

## I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kota Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan kedua di Indonesia mempunyai kepadatan penduduk, sebanyak 2.824.172 jiwa pada tahun 2014 (Dispenduk Capil Surabaya). Pada tahun 2013 penduduk miskin Kota Surabaya sebanyak 1.687.000 jiwa, dengan luas kota sekitar 29.000 hektar, seharusnya jumlah penduduk ideal kota Surabaya hanya bisa menampung 2.175.000 jiwa. Adanya kepadatan penduduk bisa dipastikan akan terjadinya ledakan penduduk daerah kumuh di area Surabaya, hal itu bisa membuat masyarakat di daerah kumuh dipastikan sulit untuk memperbaiki kondisi tempat tinggalnya yang semakin lama semakin tidak layak untuk dikatakan tempat tinggal yang sehat dan nyaman.

Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai kota besar di dunia.

Menurut UU No. 1 pasal 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, dimana permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena keidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Peran aktif pemerintah daerah untuk mengurangi rumah kumuh yang ada di daerah Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya tidak ada henti-hentinya untuk memperbaiki agar tercipta rumah yang sehat dan layak huni. Salah satu upaya

untuk mengurangi rumah tidak layak huni ini adalah melalui program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK). RSDK adalah program refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan masyarakat atau seseorang agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan lebih berdaya dalam kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan pada kawasan perumahan kampung yang kondisi fisik lingkungannya masih memerlukan perbaikan.

Program RSDK Kota Surabaya merupakan program pembangunan berdasar partisipasi masyarakat (*community based development*). Pelaksanaan program diarahkan untuk melakukan pemberdayaan kepada warga masyarakat setempat agar dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan. Program ini dilaksanakan sejak tahun 2003, pedoman pelaksanaan program ini terlampir pada Peraturan Walikota Surabaya No 19 Tahun 2009 setelah itu diperbaharui menjadi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya.

Program RSDK ini diimplementasikan maka akan tercapainya tujuan program RSDK. Bisa dilihat secara terperinci dalam Peraturan Walikota Surabaya No 33 Tahun 2011 yang berisi :

- a. Mengurangi dan mengentaskan kehidupan keluarga miskin dipermukiman kumuh
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui suatu upaya penanganan terpadu baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat
- c. Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreatifitas, dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan dilingkungan tempat tinggalnya.
- d. Meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang menunjang perekonomian keluarga miskin.

Adapun mekanisme pelaksanaan program RSDK ini adalah (1) Musyawarah Rencana Pembangunan Musrembang di Kelurahan-kelurahan, (2) Usulan Musrembang Tingkat Kelurahan diusulkan ke tingkat Kota dan selanjutnya di proses survey oleh Dinas Sosial Kota Surabaya hal ini dilakukan agar tidak terjadinya salah sasaran, dengan tujuan untuk mengetahui bahwa keluarga yang

mendapatkan bantuan tersebut memang rumahnya layak untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Surabaya (Peraturan Walikota Surabaya No 33 Tahun 2011). Berdasarkan hasil dari musrembang yang telah di survey pada tahun 2013 oleh Dinas Sosial, Kecamatan-Kecamatan yang berhak untuk mendapatkan Dana bergulir sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Kecamatan yang mendapatkan Dana Bantuan RSDK**

Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga
1. Bringin	20 KK
2. Sambikerep	20 KK
3. Lontar	20 KK
4. Manukan Kulon	20 KK
5. Pradah Kali Kendal	20 KK
6. Tambak Langon	20 KK
7. Jeruk	20 KK
8. Kedurus	20 KK
9. Balas Klumpik	20 KK
10. Dukuh Pakis	20 KK
11. Tenggilis Mejoyo	20 KK
12. Wonorejo Rungkut	20 KK
13. Penjaringanasar i	20 KK
14. Ploso	20 KK
15. Bangkingan D	20 KK
16. Krembangan Utara	20 KK
17. Pengirian	20 KK
18. Kapasan	20 KK
19. Rangkah	20 KK
20. Tegalsari	20 KK

nyak Kecamatan di Surabaya Kecamatan Tegalsari berhak mendapatkan bantuan program bantuan dana perbaikan rumah

karena di Kecamatan Tegalsari masih banyak rumah yang tidak layak untuk ditempati, selain itu dana bergulir yang ada dimasyarakat, sudah tidak berjalan lagi. Pemanfaatan dana bergulir ini untuk menunjang kegiatan usaha ekonomi keluarga miskin. Kecamatan Tegalsari ini memiliki banyak kelurahan, dimana yang berhak menerima bantuan dana bergulir ini adalah kelurahan Wonorejo. Kelurahan Wonorejo dipilih karena ada survey terdahulu Dinas sosial serta Bappeko, menyebutkan bahwa di Kelurahan Wonorejo masih banyak rumah yang tidak layak huni daripada kelurahan lain yang ada di kecamatan Tegalsari. Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan salah satu pegawai di Dinas Sosial Kota Surabaya Bapak Arman (pengawas program RSDK), beliau menyebutkan;

“ Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari mendapatkan jatah bantuan dana bergulir ini untuk 20 KK. Jumlah yang diterima setiap Kepala Keluarga (KK) yakni mendapatkan bantuan sebesar Rp. 5.000.000,-. Kelurahan Wonorejo ini memenuhi syarat untuk dilakukannya pemberian dana perbaikan rumah. Hal yang perlu diperbaiki adalah kondisi atap yang kurang layak, kondisi lantai yang masih menggunakan tanah dan dinding rumah yang menggunakan triplek “.

Pola pendanaan dalam program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) berasal dari APBD Kota Surabaya. Dana tersebut dikelola oleh pengurus Unit Pembinaan Keluarga Miskin dan Dinas Sosial memanfaatkan Dana yang sudah diterima dengan baik serta semua dana dikelola memang untuk warga miskin yang membutuhkan bantuan dana dalam perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Surabaya. Syarat penerima program bantuan ada pada Perwali Surabaya No 33 Tahun 2011. Kriteria penerima program : (1) harus keluarga miskin, (2) harus ber KK Kota Surabaya, (3) dan rumah tidak dalam tanah sengketa, (4) bersedia mengembalikan dana pinjaman kepada pelaksana program di tingkat kelurahan (UPKM), (5) isteri atau suami atau anggota keluarga yang tinggal serumah, bersedia untuk mengikuti pelatihan dan mengembangkan usaha sesuai dengan

pelatihan, (6) mendapatkan rekomendasi dari RT dan RW setempat.

Menurut Perwali Surabaya Nomor 33 Tahun 2011 Pelaksanaan program ini diaksanakan oleh Pihak Unit Pembinaan Keluarga Miskin (UPKM), personil UPKM sebanyak 6 orang, terdiri dari 2 perempuan, 1 tokoh masyarakat, 2 keluarga miskin, dan unsur warga lainnya sebanyak 1 (satu) orang (yang mampu menangani pembukuan keuangan). Struktur pengurus UPKM terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara, yang semuanya merangkap sebagai anggota bersama ketiga orang lainnya. Keenam orang tersebut harus penduduk setempat dan memiliki KTP dengan alamat dilokasi Kelurahan setempat. Pada pelaksanaan tugasnya, UPKM perlu berkoordinasi atau kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya di wilayah kelurahan setempat. Untuk meningkatkan efektifitas dan kapasitas UPKM dalam pembinaan keluarga miskin, baik pada aspek sosial, ekonomi maupun fisik, UPKM sebagai kelompok masyarakat dapat melakukan perikatan kerjasama atau kontrak kerja dengan instansi pemerintah atau swasta yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebutkan di Perwali Surabaya Nomor 33 Tahun 2011.

Selama ini pihak Unit Pembinaan Keluarga Miskin (UPKM) Tegalsari telah mengimplementasikan komponen utama yakni : (1) penyiapan kelembagaan dan program masyarakat adalah berupa penguatan terhadap lembaga yang ada atau pembentukan lembaga baru. Lembaga tersebut bertanggung jawab kepada warga (melalui forum musyawarah Rukun Warga) dan kepada Pemerintah Daerah (melalui Kelurahan dan Dinas Sosial) mengenai pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan kegiatan dan dana secara berkelanjutan. Pola pembentukan kelembagaan lokal harus berdasarkan atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat (bottom up). Untuk menunjang kelancaran kegiatan kerja, UPKM mendapatkan bantuan stimulan peralatan kerja dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial, sesuai dengan ketersediaan anggaran., (2) pelatihan keterampilan usaha adalah untuk mendorong kemandirian keluarga dalam mengatasi keluarga miskin dengan memberikan keterampilan usaha seperti pelatihan membuat handycraft dan tata boga yang bisa digunakan sebagai modal usaha guna menumbuhkan dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan,

(3) perbaikan lingkungan dan bangunan tidak layak huni, ini pelaksanaannya setelah adanya pelatihan keterampilan, komponen yang diperbaiki hanya atap, dinding dan lantai dan (4) pembekalan keberlanjutan program dan kemandirian warga, pembekalan ini dilakukan setelah selesainya pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni di Tegalsari, pembekalan keberlanjutan ini mengenai dana bergulir yang ada pada masyarakat disebutkan di Perwali Surabaya Nomor 33 Tahun 2011.

Untuk mengetahui sejauh mana hasil peningkatan aspek fisik/lingkungan dari program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dalam hal perbaikan rumah tidak layak huni yang telah diimplementasikan, yang nantinya akan membawa perubahan kondisi lingkungan di masyarakat menjadi lebih baik, bagaimana program tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan serta bagaimana hasil dari diterapkannya program tersebut. Maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) dalam Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya diukur dengan teori terhadap kriteria evaluasi menurut William N Dunn dengan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) dalam Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya ?

## C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) dalam Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya

## D. Manfaat

Manfaat yang diharapkan peneliti untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih terhadap pengembangan pengetahuan tentang evaluasi kebijakan publik.

## 2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Sosial Kota Surabaya

Hasil penelitian akan memberikan sumbangan ide mengenai hal-hal yang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan program perbaikan rumah tak layak huni serta memberikan masukan terhadap program yang sedang dijalankan agar sesuai dengan prosedur yang ada dan tepat sasaran.

b. Bagi Masyarakat Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari

Hasil evaluasi akan menyadarkan mengenai pentingnya pemahaman terhadap rumah layak huni dan manfaat program perbaikan rumah tak layak huni.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil evaluasi ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi program rehabilitasi sosial daerah kumuh rumah tidak layak huni.

## II. KAJIAN PUSTAKA

### A. Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah “kebijakan (*policy*)” berasal dari bahasa Yunani dan Sanskerta “polis” (negara, kota) yang selanjutnya masuk dalam bahasa latin menjadi “politia” yang artinya bersinggungan dengan pengendalian masalah, masalah publik atau administrasi pemerintahan.

Kebijakan dapat diartikan sebagai suatu peraturan untuk mewujudkan serangkaian tujuan dan sasaran dari program pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh Anderson dalam Widodo (2001:190) menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

### B. Evaluasi Kebijakan Publik

#### 1. Konsep Evaluasi Kebijakan Publik

Sebagaimana diungkapkan Agustino, (2012:186) Evaluasi kebijakan merupakan sebuah aktifitas fungsional, sama tuanya dengan kebijakan itu sendiri. Para analis dan perumus kebijakan selalu membuat penilaian melalui pendapat mereka mengenai manfaat atau pengaruh dari

kebijakan, program, dan proyek yang tengah dan / atau telah dilaksanakan.

“ Berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika ia bernilai dan bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus, dan pengguna lainnya secara umum”.

Menurut Agustino (2012:189) Ada tiga fungsi dari evaluasi kebijakan yang dapat dijabarkan ialah :

- a. Evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. (1) seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakn/program. dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu akan dicapai. (2) apakah tindakan yang ditempuh oleh implementating agencies sudah benar-benar efektif, responnsif, akuntabel dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan harus juga memperhatikan persoalan-persoalan hak azasi manusia kietika kebijakan tersebut telah dilaksanakan. Hal ini perlu adanya evaluator yang dimana evaluator ini bertugas sebagai monitoring, yang bisa menilai sukses atau tidaknya suatu klebijakan tersebut, (3)bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan output dan outcome yang dihasilkan dari suatu implementasi kebijakan.
- b. Evaluasi kebijakan berfungsi untuk memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Seharusnya tidak didasari oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Kebijakan dibuat harus pada kepentingan yang memang dipertujukan bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan-tujuan dari target-target yang hendak dicapai.
- c. Evaluasi kebijakan berfungsi juga untuk memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakn lainnya, termasuk bagi perumusan masalah maupun pada rekomendasi kebijakan. Informasi

tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan bagi reformulasi masalah kebijakan dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang. Evaluasi kebijakan dapat sebagai penyumbang rekomendasi alternatif kebijakan perlu diperbaharui untuk memnyempurnakan kebijakan tersebut lebih baik.

### C. Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Dalam melakukan evaluasi kebijakan selain menentukan tipe evaluasi tetapi juga harus menentukan pendekatan-pendekatan apa yang akan digunakan dalam melakukan evaluasi kebijakan. Menurut Dunn (2003:613) pendekatan-pendekatan dalam evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Pendekatan evaluasi semu

Evaluasi semu (*pseudo evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri atau tidak kontroversial.

#### 2. Pendekatan evaluasi formal

Evaluasi formal (*formal evaluation*) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan, tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program. Dalam pendekatan formal terdapat dua tipe untuk memahami evaluasi lebih lanjut, yaitu :

- a. Evaluasi sumatif yaitu evaluasi yang meliputi usaha untuk memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah suatu kebijakan atau program diterapkan jangka waktu tertentu.
- b. Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang meliputi usaha-usaha untuk

secara terus menerus memantau pencapaian tujuan-tujuan dan target formal

### 3. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi keputusan teoritis (*decision-theoretic evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Perbedaan pokok antara evaluasi teoritis keputusan di satu sisi, dan evaluasi semu dan evaluasi formal disisi lainnya, adalah bahwa evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik yang tersembunyi atau dinyatakan. Ini berarti bahwa tujuan dan target dari para pembuat kebijakan dan administrator merupakan salah satu sumber nilai karena semua pihak yang mempunyai andil dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan dilibatkan dalam merumuskan tujuan dan target dimana kinerja nantinya akan diukur.

#### D. Tipe Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik dibedakan dalam dua macam tipe menurut Widodo (2013:112), yaitu sebagai berikut :

1. Evaluasi hasil (*outcomes of publik policy implementation*) merupakan riset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan. Ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah sejauh mana apa yang menjadi tujuan program dapat dicapai.
2. Evaluasi proses (*process of publik policy implementation*) merupakan riset evaluasi yang mendasarkan diri pada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juklis). Ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah kesesuaian proses implementasi suatu kebijakan dengan garis petunjuk (*guide lines*) yang telah ditetapkan.

#### E. Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai ?	Unit Pelayanan
Efisien	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit Efisiensi biaya

Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah ?	Biaya tetap (masalah tipe I) Efektifitas (masalah tipe II)
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda ?	Kriteria Pareto Kriteria Paldor Kriteria Rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan atau nilai kelompok-kelompok tertentu ?	Konsistensi dengan survey warga Negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai ?	Program publik harus merata dan efisien

Sumber Dunn (2003:610)

Kriteria untuk mengevaluasi kebijakan publik menurut Dunn (2003:429) merumuskan 6 (enam) criteria dalam evaluasi adalah sebagai berikut :

#### 1. Efektifitas

Efektifitas berkenaan dengan apakah suatu kebijakan yang dilaksanakan mencapai hasil yang diharapkan. Efektifitas yang berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit peroduk atau layanan atau nilai moneter.

#### 2. Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat usaha tertentu. Efisiensi yang sinonim dengan rasionalitas ekonomi merupakan hubungan antara ekektivitas dan usah yang umumnya diukur dengan biaya moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang menvapai efejtivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi.

#### 3. Kecukupan

Kecukupam berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilsi atau kesempatan yang menumbuhkan masalah. Kriteria ini menekankan kuatnya hubungan antara alternative kebijakan dan hasil yang dicapai.

#### 4. Kesamaan

Kesamaan berkaitan erat dengan rasionalitas legal dan social dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang

berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin efektif, efisien dan mencukupi, namun mungkin ditolak karena menghasilkan distribusi biaya dan manfaat yang tidak merata. Hal ini terjadi karena mereka yang membutuhkan tidak menerima pelayanan sesuai dengan jumlah mereka, mereka yang paling tidak mampu membayar dibebani biaya yang tidak proposional atau mereka yang paling menerima manfaat tidak membayar ongkos.

#### 5. Responsitivitas

Responsitivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Kriteria ini penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

#### 6. Ketepatan

Ketepatan berhubungan erat dengan rasionalitas substansif karena pertanyaan ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu, tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria ketepatan mempertanyakan apakah tujuan tersebut tepat untuk suatu masyarakat.

Penelitian Evaluasi Program rehabilitasi sosial daerah kumuh ini akan menggunakan pendekatan evaluasi formal dengan tipe evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilakukan karena program berjalan secara terus-menerus serta untuk mengetahui hasil dari program selesai dilaksanakan, serta hasil dari program tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Berkaitan dengan penjelasan mengenai berbagai tipe serta kriteria evaluasi, maka peneliti tidak bermaksud untuk meneliti keseluruhan tahapan kebijakan, melainkan hanya tahap penilaian hasilnya saja (evaluasi hasil) yaitu untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program yang dapat diukur berdasarkan evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn.

### III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini berlokasi di Kota Surabaya, tepatnya di Kelurahan Wonorejo

Kecamatan Tegalsari. Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah warga Surabaya yang kurang mampu di Kota Surabaya, dengan jumlah populasinya sebanyak 20 orang. Pengambilan anggota sampel menggunakan teknik sampel jenuh, teknik penentuan sampel bila semua populasi digunakan menjadi sampel.

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara untuk memperoleh data, yaitu pengumpulan data primer dalam penelitian ini didapatkan menggunakan instrument penelitian, yaitu kuesioner, observasi dan wawancara (Sugiyono, 2012:156) dan pengumpulan data sekunder berupa literature yang bersumber dari buku-buku, referensi jurnal, arsip atau dokumentasi, penelitian terdahulu dan sebagainya. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis data kuantitatif dan analisis deskriptif.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, anggota sampel berjumlah 20 KK yang telah di ambil dari survey di Kelurahan Wonorejo. Karakteristik KK tersebut dapat diidentifikasi menurut pendidikan terakhir, pekerjaan dan penghasilan. Pengelompokan responden tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.6**

**Karakteristik KK menurut tingkat penghasilan**

Penghasilan per bulan	Frekuensi	Prosentase
< Rp.1.250.000	12	60%
Rp.1.250.000-Rp.1.500.000	6	30%
Rp.1.550.000-Rp.1.800.000	1	5%
>Rp.1.800.000	1	5%
Total	20	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2015

**Tabel 4.7**

**Karakteristik KK Berdasar Pendidikan Terakhir**

Pendidikan Responden	Jumlah	Persentase
Tidak sekolah	4	20%
Tamat SD	4	20%
Tamat SMP	8	40%
Tamat SMA/SMK	4	20%
Tamat Perguruan Tinggi	0	0
Jumlah	20	100%

Sumber : Data primer diolah. 2015



**Tabel 4.8**  
**Karakteristik KK Berdasarkan Pekerjaan**

Pekerjaan	Frekuensi	Prosentase
Pegawai Negeri Sipil	0	0%
Pegawai swasta	6	30%
Wirausaha	1	5%
Lainnya	13	65%
Total	20	100%

Sumber : Data primer diolah, 2015

Berdasarkan hasil dari penelitian di Kelurahan Wonorejo tentang Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) dalam kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni yang bantuannya diterima oleh 20 KK. Pada setiap indikator evaluasi menurut William N Dunn yang sudah dimasukkan kedalam kelas interval sesuai dengan kategori kriteria interpretasi skor yang sudah ditentukan. Nilai pada kelas interval dinyatakan dengan kategori Sangat Baik, Baik, Kurang baik, Baik dan Tidak Baik.

**Tabel 4.20**  
**Kategori skor prosentase sub indikator evaluasi program RSDK dalam kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari**

No	Pertanyaan	Prosentase	Kategori
1	Peningkatan atap rumah yang bocor	85%	Sangat Baik
2	Peningkatan dinding rumah	83,75%	Sangat Baik
3	Peningkatan lantai rumah yang lembab dan terbuat dari tanah	85%	Sangat Baik
4	Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan dasar	81,25%	Sangat Baik
5	Peningkatan pencahayaan dan ventilasi udara	82,5%	Sangat Baik
6	Jumlah unit pembinaan keluarga miskin (UPKM)	55%	Baik

7	Kepanitiaan	70%	Baik
8	Kesesuaian waktu pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni	63,75%	Baik
9	Peran dinas sosial	53,75%	Baik
10	Peran masyarakat	62,5%	Baik
11	Ketersediaan pekerja	50%	Kurang baik
12	Kesesuaian dana	63,75%	Baik
13	Peningkatan atap, dinding, lantai	88,75%	Sangat baik
14	Bahan material	83,75%	Sangat baik
15	Peningkatan prasarana lingkungan	82,5%	Sangat baik
16	Sosialisasi yang dilakukan UPKM	67,5%	Baik
17	Pemerataan dana bantuan	85%	Sangat baik
18	Partisipasi masyarakat	88,75%	Sangat baik
19	Sikap masyarakat atas program RSDK	67,5%	Baik
20	Permasalahan waktu berlangsungnya perbaikan rumah tidak	65%	Baik
21	Penyelesaian masalah oleh pihak UPKM	62,5%	Baik
22	Kegunaan program bagi masyarakat	80%	Sangat Baik
23	Pemahaman tentang program	78,75%	Sangat baik

Sumber : Rekap penilaian masyarakat, 2015

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa. Namun sayangnya hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan yang relatif masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya. Oleh karena itu, pemerintah Kota Surabaya mengurangi rumah tidak layak huni dengan membuat program rehabilitasi sosial daerah kumuh.

Penelitian dengan judul evaluasi program RSDK dalam kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, ini menggunakan pendekatan formal pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan dengan mengevaluasi atas dasar tujuan program kebijakan, dengan menggunakan evaluasi formatif evaluasi tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh evaluator secara terus menerus untuk mensukseskan tujuan dan target yang ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan variabel mandiri atau satu variabel yaitu evaluasi program RSDK dalam kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni. Evaluasi tersebut diukur menggunakan teori yang dikemukakan oleh William N Dunn dengan menggunakan enam indikator yaitu, efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Dari setiap indikator tersebut diturunkan menjadi sub indikator yang dimana dari sub indikator tersebut akan memunculkan pertanyaan. Pertanyaan tersebut berupa kuesioner yang dibagikan kepada 20 orang penerima bantuan program perbaikan rumah tidak layak huni di kelurahan Wonorejo. Kuesioner tersebut berisi tentang klasifikasi masyarakat menurut nama responden, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, penghasilan perbulan. Hasil dari klasifikasi masyarakat tersebut bahwa pendidikan terakhir masyarakat kebanyakan adalah tamatan SMP, pekerjaan masyarakat rata-rata menjadi tukang cuci, ibu rumah tangga, tukang becak, sopir, kuli bangunan, sedangkan penghasilan mereka tiap bulan rata-rata sebesar kurang dari Rp. 1.250.000 rupiah.

Bisa disimpulkan bahwa dilihat dari pekerjaan dan jumlah penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat perbulan maka tujuan dan sasaran program yang telah disebutkan di Peraturan Walikota Surabaya Nomor 33 Tahun 2011 tentang kriteria dan syarat penerima bantuan yakni keluarga miskin, maka hal ini menunjukkan kecilnya penyimpangan kelompok sasaran penerima bantuan program RSDK.

Indikator efektivitas dapat diketahui mendapat prosentase sebesar 83,5% dengan kategori sangat baik. Dimana indikator efektivitas ini terdapat dua sub indikator yakni pencapaian tujuan program dan sasaran. Indikator efektivitas dapat dilihat dari pertanyaan nomer 1-5. Jawaban responden nomer 1 mengenai peningkatan atap rumah yang bocor mendapatkan prosentase sebesar 85% kategori sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan atap rumah warga yang bocor dapat diperbaiki dengan sangat baik, nomer 2 dinding rumah yang rusak atau terbuat dari triplek dan gedeg prosentasenya sebesar 83,75% dengan kategori sangat baik, jadi peningkatan kekuatan dinding rumah warga dirasa sangat baik, dengan adanya perbaikan ini dinding warga yang semua terbuat dari gedeg menjadi kokoh dengan digantinya dengan material batu bata.

Pertanyaan nomer 3 mengenai peningkatan sarana dan prasarana lingkungan dasar prosentasenya sebesar 81,25% dengan sangat baik, maka bisa disimpulkan bahwa keadaan sarana dan prasarana lingkungan rumah warga setelah pelaksanaan program keadaannya sangat baik. Pertanyaan nomer 4 pencahayaan matahari dan ventilasi udara memperoleh prosentase sebesar 82,5% dengan kategori sangat baik, maka mayoritas rumah warga memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara yang sangat baik setelah pelaksanaan program. Pertanyaan nomer 5 keadaan lantai setelah pelaksanaan program memperoleh prosentase sebesar 83,5% dengan kategori sangat baik, karena mayoritas lantai warga berlantai dari tanah, bisa disimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut bahwa tujuan dan sasaran program telah tercapai, bisa dilihat dari kondisi rumah sebelum program yang mayoritas kurang baik dan dari penghasilan per bulan yang rata-rata dibawah Rp. 1.250.000 rupiah maka kemungkinan kecil terjadinya penyimpangan tujuan dan sasaran program.

Indikator efisiensi memperoleh prosentase sebesar 84,15% berada pada kategori sangat baik. Hasil prosentase tersebut bisa dilihat para pertanyaan nomer 6-13. Nomer 6 pertanyaan

tentang jumlah unit pembinaan keluarga miskin (UPKM) prosentasenya sebesar 55% dengan kategori baik. Pertanyaan nomor 7 pertanyaan tentang kepanitiaan mendapatkan prosentase sebesar 70% dengan kategori baik, maka kepanitiaan program RSDK ini yang dilakukan oleh UPKM berjalan dengan baik. Pertanyaan nomor 8 tentang kesesuaian jadwal perbaikan rumah tidak layak huni prosentasenya 63,75% dengan kategori baik.

Pertanyaan nomor 9 peran dinas sosial dalam pelaksanaan program mendapatkan prosentase sebesar 53,75% yang berkategori baik, maka peran dinas sosial terhadap pelaksanaan program perbaikan rumah ini sesuai dengan prosedur. Pertanyaan nomor 10 peran masyarakat terhadap program perbaikan rumah ini prosentasenya sebesar 62,5% dengan kategori baik, bahwa pada pelaksanaan program perbaikan ini dari awal sosialisasi program yang dilakukan oleh dinas sosial dan pihak UPKM, sampai dengan selesainya perbaikan rumah tidak layak huni ini masyarakat berperan penuh atas berlangsungnya pelaksanaan program.

Pertanyaan nomor 11 ketersediaan pekerja prosentasenya sebesar 100%, menurut warga ketersediaan pekerja dalam perbaikan rumah yang berlangsung kurang banyak, karena setiap rumah disediakan pekerja sebanyak 2 orang, untuk memperbaiki atap, lantai dan dinding. Jadi, seharusnya ada penambahan pekerja dalam mengerjakan perbaikan rumah, agar perbaikan rumah warga lebih cepat dan ringan jika dikerjakan oleh banyak pekerja. Pertanyaan nomor 12 tentang kesesuaian dana ini mendapat prosentase sebesar 63,75% termasuk pada kategori baik. Menurut warga dana yang diterima sebesar Rp. 5.000.000,- oleh warga tidak cukup untuk memperbaiki keseluruhan atap, lantai dan dinding.

Indikator kecukupan mendapatkan prosentase rata-rata sebesar 85% dengan kategori baik. Jika ingin mengetahui hasil dari indikator kecukupan ini bisa dilihat pada pertanyaan nomor 13-15. Pertanyaan nomor 13 tentang peningkatan atap, dinding dan lantai setelah pelaksanaan program prosentasenya sebesar 88,75% dengan kategori sangat baik. Jadi peningkatan komponen atap, lantai dan dinding tersebut setelah diolaksanakannya program perbaikan rumah tidak layak huni ini sangat baik, atapnya yang dulu bocor sekarang tidak bocor, Intainya yang dulu terbuat dari tanah dan keadaannya lembab sekarang setelah diperbaiki lantainya terbuat dari keramik dan tidak lembab lagi, dinding yang dahulu terbuat dari

gedeg sekarang sudah diperbaiki menjadi batu bata maka tidak khawatir untuk roboh lagi, dengan peningkatan bangunan tersebut maka terciptanya rumah layak huni.

Pertanyaan nomor 14 tentang material bangunan yang digunakan dalam memperbaiki rumah prosentasenya sebesar 83,75% dengan kategori sangat baik, diketahui bahwa bahan bangunan yang digunakan adalah material yang bagus, agar kekuatan bangunan setelah diperbaiki kokoh. Pertanyaan nomor 15 tentang peningkatan sarana dan prasarana lingkungan prosentasenya 82,5% dengan kategori baik, hal ini juga bisa diketahui bahwa adanya peningkatan sarana dan prasarana setelah diadakannya perbaikan rumah tidak layak huni.

Indikator pemerataan mendapatkan prosentase rata-rata sebesar 76,25% dengan kategori sangat baik. Hasil dari indikator pemerataan tersebut bisa dilihat di pertanyaan nomor 16-17. Pada pertanyaan nomor 16 tentang pemerataan sosialisasi yang dimulai dari pendataan sampai berakhirnya perbaikan rumah tersebut mendapatkan prosentase nilai sebesar 67,5% dengan kategori baik. Maka bisa disimpulkan bahwa sosialisasi yang diberikan oleh pihak UPKM kepada warga berjalan dengan baik dan merata. Pertanyaan nomor 17 tentang pemerataan dana bantuan mendapatkan prosentase sebesar 85% dengan kategori sangat baik, bahwa pemerataan bantuan yang diterima oleh warga sama-sama mendapatkan dana bantuan yang sama sebesar 5 juta berupa bahan material.

Indikator responsivitas prosentase rata-ratanya sebesar 64,84% dengan kategori baik. Ada dua sub indikator responsivitas ini yaitu kesesuaian harapan masyarakat dengan adanya masalah dan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh masyarakat. Dimana sub indikator tersebut diturunkan menjadi pertanyaan, masing-masing pertanyaan tersebut berada pada nomor 18-21. Pertanyaan nomor 18 keikutsertaan masyarakat dalam pengerjaan perbaikan rumah prosentasenya sebesar 88,75% dengan kategori sangat baik. Bahwa bisa diketahui partisipasi masyarakat dalam program ini sangat berpengaruh besar.

Nomer 19 sikap masyarakat atas program yang berjalan ini mendapatkan prosentase sebesar 67,5% dengan kategori baik. Nomer 20 tentang permasalahan yang ada pada waktu perbaikan rumah tidak layak huni ini mendapatkan prosentase sebesar 65% dengan kategori baik. Nomer 22 tentang penyelesaian masalah oleh pihak upkm mendapatkan prosentase sebesar 62,5% dengan kategori baik. Tetapi dalam pelaksanaan perbaikan

rumah ini, menurut warga pelaksanaan jadwal waktu perbaikan yang dikerjakan terlalu lama. Oleh karena itu kadang-kadang warga mengalami permasalahan perbaikan seperti , jika turun hujan maka perbaikan akan dihentikan, dan hal itu akan menghambat selesainya perbaikan rumah.

Indikator ketepatan mendapatkan rata-rata sebesar 78,75% dengan kategori sangata baik. Mempunyai dua sub indikator yakni kegunaan program dan pemahaman masyarakat tentang program RSDK dalam kegiatan rumah tidak layak huni. Sub indikatout akan diturunkan menjadi pertanyaan , bisa dilihat di pertanyaan nomor 22-23. Pertanyaan nomor 24 tentang kegunaan program memiliki nilai prosentase sebesar 80% dengan kategori sangat baik sdeangkan pertanyaan nomor 24 tentang pemahaman masyarakat tentang program RSDK prosentasenya sebesar 77,5%. Hal ini diketahui bahwa adanya program RSDK perbaikan rumah ini sangat berguna bagi masyarakat khususnya warga Surabaya yang kondisi ekonominya rendah dan memiliki rumah yang tidak layak huni dan tidak sehat. Pemahaman masyarakat terhadap program ini baik, karena dari awal sosialisasi program RSDK sampai dengan selesainya program peran masyarakat sangat berpengaruh.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari evaluasi pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh dalam perbaikan rumah tidak layak huni di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya berikut antara lain:

Kriteria efektifitas ini terdapat dua sub indikator yakni Pencapaian Tujuan dan pencapaian target dan sasaran. Tingkat ketepatan kelompok sasaran pelaksanaan program cukup tinggi, sebesar 95% tepat sasaran masyarakat miskin dilihat dari tingkat penghasilan per bulan dan tepat sasaran rumah tidak layak huni, dilihat dari kondisi rumah sebelum pelaksanaan program prosentasenya sebesar 83,5%. Dilihat dari tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan maka program RSDK ini sudah efektif.

Kriteria efisiensi pelaksanaan program ini diwujudkan dalam terselenggaranya kepanitiaan program yang berjalan cukup baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mekanisme pelaksanaan program bisa berjalan dengan efisien. Kepanitiaan program ini mandapatkan prosentase sebesar 70% . Peran Dinas Sosial yang berjalan juga cukup baik. Penggunaan bantuan, ketepatan

jadwal dan pekerja prosentasenya sebesar 71,25%. Dimana ketersediaan pekerja ini dirasa kurang cukup karena jumlah pekerja hanya dua pekerja. Oleh karena itu dirasa kurang cukup untuk memperbaiki perbaikan rumah. Jika ada penambahan jumlah pekerja yang lebih banyak mungkin jadwal perbaikannya akan selesai lebih cepat. Penggunaan dana yang ada sudah efisien karena dana yang digunakan untuk membeli material bahan bangunan perbaikan rumah, kepanitiaan program RSDK ini juga berjalan baik.

Kriteria Kecukupan pelaksanaan program yang dinilai dari keberhasilan program berdasarkan aspek fisik tercapai sebesar 85%. Keberhasilan ini pencapaiannya cukup tinggi karena peningkatan atap, dinding lantai prosentasenya sebesar 88,75%, bahan materialnya yang digunakan juga cukup baik dengan prosentase sebesar 83,75% dan peningkatan sarana dan prasarana tersebut meningkat sekitar 82,5%. Peningkatan tertinggi pencapaiannya pada peningkatan atap,dinding dan lantai yang dirasa paling tinggi.

Kriteria perataan ini mempunyai sub indikator keadilan program, dimana biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada masyarakat. Adanya pemerataan sosialisasi yang dilakukan oleh UPKM kepada warga berhasil sekita 67,5% dan pemerataan dana yang dirasa warga cukup baik sekitar 85%. Jadi indikator perataan ini dirasa berhasil sekitar 76,25% dengan kategori sangat baik.

Tingkat responsivitas masyarakat atas program perbaikan rumah tidak layak huni diukur dari ,presepsi tau nilai masyarakat sebesar 70,93%. Permasalahan atau kendala yang muncul pada waktu perbaikan rumah sebesar 65% serta penyelesaian yang dilakukan oleh pihak UPKM sebesar 62,5%.

Tingkat ketepatan kelompok sasaran pelaksanaan program sebesar 78,75%. Ketepatan sasaran juga bisa dilihat dari masyarakat miskin dari tingkat penghasilan masyarakat perbulan , tepat sasaran rumah tidak layak huni, dilihat dari kondisi rumah sebelum pelaksanaan bantuan program. Ketepatan ini berhubungan dengan kegunaan program ini berguna apa tidak bagi masyarakat dan pemahaman masyarakat akan program perbaikan rumah tidak layak huni. Indikator ketepatan sasaran pelaksanaan program sangat tepat diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni di Kota Surabaya.

### A. REKOMENDASI

1. Untuk kerjasama dengan lembaga diluar pemerintahan, perlu dipertimbangkan lagi bentuk bantuan serta mekanisme serta besarnya bantuan yang diberikan, karena untuk pinjaman uang dengan jumlah lima juta yang cukup besar masyarakat kesulitan mengembalikan. Oleh karena itu masyarakat tidak mau untuk mengembalikan dana sebesar lima juta tersebut.
2. Dalam hal efisiensi ketersediaan pekerja dirasa kurang karena dengan tersedianya pekerja sebanyak 2 orang tersebut dirasa belum untuk mencukupi perbaikan rumah yang komponen atap, lantai dan dinding. Jika tersedianya pekerja yang cukup maka jadwal pelaksanaan perbaikan rumah akan terselesaikan dengan cepat.
3. Agar program berjalan berkelanjutan maka diperlukan penyuluhan ke masyarakat agar masyarakat paham akan dana bergulir.
4. Bantuan dana sebesar Rp. 5.000.000 menurut masyarakat masih belum tercukupi jika digunakan untuk memperbaiki keseluruhan komponen yang akan diperbaiki, karena kerusakan komponen bangunan rumah setiap warga berbeda-beda tingkat kerusakannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2012, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung: CV AFABETA.
- Danim, Sudarman 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Penerbit Rineka Cipta.
- Dunn William N. 1981. *Public Policy Analysis: An Introduction New Jersey*: Englewood Cliffs
- Dunn, William N, (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Parsolong, Harban, 2012, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Alfabeta
- Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kota Surabaya
- Sardana, Agus S. 2014. *Perencanaan Kawasan Permukiman*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Steers, M Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Teori*. Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2010. *Metode penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 1 pasal 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman Kumuh
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance*. Surabaya: Insan Cendekia
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Widodo, Joko, 2012, *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang : Banyumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori Dan Proses*. Yogyakarta: Medpress (Anggota IKAPI)
- [www.dinsosby.go.id](http://www.dinsosby.go.id)  
[surabayakota.bpps.go.id](http://surabayakota.bpps.go.id)